

**KINERJA PEMERINTAH KOTA DUMAI DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DARI SEKTOR PELABUHAN PERIODE 2005-2009**

TESIS

**OLEH:
RURY FEBRINA
0821202038**



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2010**

Kinerja Pemerintah Kota Dumai Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pelabuhan Periode 2005-2009

Oleh: Rury Febrina

(Di bawah bimbingan Prof.Dr. Afrizal, MA dan Drs. Edi Indrizal, M.Si)

RINGKASAN

Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat, oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Salah satu indikator atau kriteria yang biasanya digunakan untuk mengetahui secara nyata tentang kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu daerah di Provinsi Riau yang diuntungkan oleh letaknya yang strategis adalah Kota Dumai. Kota Dumai memiliki kawasan yang strategis dan terletak dekat Selat Malaka yang terkenal sebagai lintasan pelayaran Internasional tersibuk ke 2 di dunia yang mempunyai garis pantai sepanjang \pm 140 KM yang sangat potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Potensi kepelabuhanan tersebut tidak bisa tergali secara maksimal mengingat pemerintah Kota Dumai belum memiliki fasilitas pelabuhan dan dermaga milik Pemko sendiri. Namun pencapaian kinerja berbanding terbalik dengan keterbatasan infrastruktur tersebut, dimana pemerintah Kota Dumai berhasil mencapai target PAD dari sektor kepelabuhanan tiap tahunnya.

Tujuan penelitian: 1) Mendeskripsikan kinerja Pemda Kota Dumai dalam peningkatan PAD dari sektor pelabuhan periode 2005-2009. 2) Factor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pemda Kota Dumai dalam meningkatkan PAD dari sektor pelabuhan periode 2005-2009.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian di Kota Dumai,. Unit analisis adalah lembaga. Pemilihan Informan dengan cara *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi. Pengujian/triangulasi data menggunakan teknik pengumpulan dan sumber data. Analisa data menggunakan teknik analisa deret waktu dan teknik penjadohan pola.

Hasil penelitian diantaranya yaitu terdapat 4 sumber penerimaan dari retribusi jasa kepelabuhan bagi PAD Kota Dumai yaitu jasa labuh (PD. Pelabuhan Dumai Bersemai), jasa pas pelabuhan (PT.Pelindo), jasa tiket penumpang (perusahaan pelayaran), dan jasa dermaga. Dari tahun 2005-2009 terjadi peningkatan penerimaan setiap tahunnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah Kota Dumai dari sektor kepelabuhanan yaitu kemampuan dari institusi pelaksana yaitu Dinas Perhubungan Bidang Perhubungan Laut diantaranya Pemerintah Kota Dumai melihat banyak permasalahan terkait pengelolaan kepelabuhanan yang menunjang peningkatan pendapatan bagi PAD diantaranya yaitu pemerintah belum memiliki fasilitas inti yaitu pelabuhan dan dermaga milik Pemda, selain itu kontribusi PT.Pelindo masih dinilai rendah dalam peningkatan PAD, multiplayer efek yang harus diterima oleh pemerintah daerah terkait tingginya aktifitas di pelabuhan Dumai yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan dan mneyebabkan kerawanan social sedangkan pemerintah tidak mendapatkan keuntungan apapun dari aktifitas yang terjadi tersebut. Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal sebelum membuat perencanaan pembangunan. Dalam penelitian ini terlihat juga bahwa pemerintah Kota Dumai telah berupaya menyusun perencanaan yang merupakan bentuk dari penyelesaian permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya seperti pendirian BUMD sebagai badan usaha yang dikelola oleh pemerintah

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak Januari Tahun 2001 pemerintah secara resmi telah melaksanakan otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga secara sekaligus dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Menurut Davey (1988) dan Devas (1998), pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Arif Roesman Efendi (2006;1), salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga Negara

Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik, yaitu: *Pertama* Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui

pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia. *Kedua* Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali. *Ketiga* Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak turunan pemekaran wilayah.

Upaya pemekaran daerah dianggap sebagai suatu terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Menurut PKP2A (Pusat Kajian dan Diklat Aparatur) Administrasi Negara yang melakukan evaluasi kinerja kasus Tasikmalaya (2004;1), implikasi dari terjadinya pemekaran daerah dapat dirasakan dalam suatu dimensi kehidupan penyelenggaraan pembangunan, karena potensi yang dimiliki tiap-tiap daerah tidak homogen. Daerah yang memiliki potensi lebih besar biasanya mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya, sedangkan daerah yang memiliki potensi kecil, tidak jarang malah mengalami kemunduran, kecuali jika daerah tersebut mampu mencari solusi dengan optimalisasi potensi yang ada dan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kota Dumai memiliki kawasan yang strategis karena terletak dekat Selat Malaka yang terkenal sebagai lintasan pelayaran internasional tersibuk ke-2 di dunia yang mempunyai garis pantai sepanjang ±140 KM yang sangat potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terdapat banyak industri-industri besar yang beraktifitas di Kota Dumai. Kota Dumai menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Dan sektor perhubungan laut merupakan salah satu sektor andalan Kota Dumai untuk mendapatkan PAD dan juga dimanfaatkan oleh industri-industri tersebut.

Terdapat empat sumber dalam pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kepelabuhanan di Kota Dumai yang berbentuk retribusi kepelabuhanan yaitu jasa labuh, jasa pas pelabuhan, jasa tiket penumpang dan jasa dermaga. Penerimaan terbesar dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya yaitu jasa labuh yang dikelola oleh BUMD PD. Pelabuhan Dumai Bersemai. Tiap-tiap sumber juga mempunyai permasalahan sendiri sehingga mengalami naik turun tiap tahunnya. Jasa labuh sangat bergantung dengan pada kunjungan kapal, dan hal tersebut juga dipengaruhi oleh semakin tingginya investor yang datang sehingga meningkatkan kunjungan kapal dipelabuhan Dumai. Jasa pas pelabuhan merupakan jasa yang dikelola oleh PT.Pelindo, Jasa tersebut juga tergantung pada aktifitas yang keluar masuk pelabuhan Dumai baik penumpang maupun angkutan. Persaingan usaha dan pangsa pasar internasional terhadap hasil produksi bisa mempengaruhi peningkatan dan penurunan aktifitas tersebut. Jasa tiket penumpang juga sangat dipengaruhi oleh jumlah penumpang yang menggunakan jasa perusahaan pelayaran, persaingan usaha juga sangat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmosoeprapto, K, 2001, *Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*, Gramedia, Jakarta
- Chema, G.Shabbir dan Rondinelli ; Denis, A, 1983, *Decentralization and Development Polici Implementation in Developing Countries*, Sage Publikation.
- Davey, K.Y, 1989. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, UI Press, Jakarta.
- Devas, Nick, Brian Binder, Anna Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1998, *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (terjemahan oleh Masri Maris), UI Press. Jakarta.
- Halim, Abdul, 2001, *Manajemen Keuangan Daerah, Bunga Rampai*", UPP AMP YKPN, Edisi pertama, yogyakarta.
- Hidajatul H, Siti, 2004, *Birokrasi dan Pembentukan Civil Society, Analisis Peran dan Fungsi Birokrasi di Indonesia*, Pukad-Hali, Surabaya.
- Mardiasmo, 2001, 'Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah', *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Jakarta, Edisi Agustus
- Prabu Mangkunegara, Anwar, 2006 , *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Riwu Kaho, Yosef, 1985, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- 1991, *Otonomi Daerah dan Titik Beratnya di letakkan pada Daerah Tingkat II*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- 2001, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Raja Grafindo persada. Jakarta.
- Sedarmayanti, 2001, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Mandar Maju, Bandung
- Siahaan, Marihot, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Soesilo, I. Nining, 2000, *Reformasi Pembangunan dengan Langkah – Langkah Manajemen Strategik*, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, FEUI, Jakarta